

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM  
DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA  
BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN  
KUTAI KARTANEGARA**

**Ina Yatul Aini, Saipul**

**eJournal Administrasi Publik  
Volume 12, Nomor 3, 2024**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pengarang : Ina Yatul Aini

NIM : 2002016088

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 21 Juni 2024

**Pembimbing**

  
**Dr. Saiful, M.Si**

**NIP. 19760907 200312 1 001**

---

*Bagian di bawah ini*

**DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Administrasi Publik	 <b>Koordinator Program Studi Administrasi Publik</b>  <b><u>Dr. Fajar Apriani, M.Si.</u></b> <b>NIP. 19830414 200501 2 003</b>
<b>Volume</b> : 12	
<b>Nomor</b> : 3	
<b>Tahun</b> : 2024	
<b>Halaman</b> : 677-684	

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Ina Yatul Aini <sup>1</sup>, Saipul <sup>2</sup>

## *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus program, organisasi pelaksana dan kelompok sasaran, serta faktor-faktor penghambat implementasi program tersebut. Jenis penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang terdiri atas data primer yang diperoleh dari key informan yaitu Koordinator Program IPA Pamsimas Desa Batuah, dan informan diantaranya Kepala Desa Batuah, Ketua Pengurus Program IPA Pamsimas, selain itu penelitian dilakukan dengan masyarakat yang memakai Program IPA Pamsimas dan masyarakat yang tidak memakai Program IPA Pamsimas. Kemudian data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, jurnal, laporan, arsip dan internet. Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, dokumentasi serta triangulasi dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dari indikator program dinilai bahwa keselarasan antara program IPA Pamsimas dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Batuah masih kurang sesuai. Indikator organisasi pelaksana telah terdapat kesesuaian antara tugas yang dibebankan dan kemampuan organisasi pelaksana. Indikator kelompok sasaran yaitu output dari program belum maksimal mencapai target sasaran. Adapun faktor penghambat pelaksanaan program : Pertama, Tidak adanya edukasi terkait air bersih maupun sosialisasi program Pamsimas. Kedua, adanya keterbatasan anggaran.*

**Kata Kunci :** *Penyediaan Air Minum, Pamsimas*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [inayah031101@gmail.com](mailto:inayah031101@gmail.com)

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu bagian dari tujuan negara. Salah satunya melalui pembangunan dalam bidang kesehatan, tidak dapat dipungkiri pola hidup bersih dan sehat ialah suatu hal yang penting untuk diperhatikan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar air bersih termasuk dalam menyediakan air minum serta sanitasi. Penyediaan terkait air minum serta sanitasi menjadi urusan wajib bagi pemerintah sesuai dengan yang tertuang pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dengan syarat tetap berpatokan pada tolak ukur pelayanan minimal yang diputuskan oleh pemerintah. Program Pamsimas merupakan program tingkat nasional dari pemerintah pusat dalam pembangunan yang kemudian masuk ke desa-desa untuk mengatasi kendala yang bersangkutan dengan air dan juga lingkungan.

Desa Batuah berdasarkan data "Kecamatan Loa Janan Dalam Angka 2023" termasuk dalam kategori dengan jumlah kepadatan penduduk terbesar ketiga sekecamatan Loa Janan, berbeda dengan dua desa terpadat lainnya Desa Batuah tidak terjangkau oleh akses layanan PDAM. Maka dari itu Desa Batuah menjadi salah satu desa yang menjalankan program Pamsimas yang diberi nama "IPA (Instalasi Pengolahan Air) Pamsimas" untuk mengatasi krisis air bersih yang menjadi permasalahan cukup sulit untuk diselesaikan selama kurang lebih 23 tahun di desa tersebut.

Setelah penulis melakukan serangkaian observasi awal terdapat beberapa masalah yang ditemukan mengenai Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ialah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air bersih dengan kandungan Ph air yang layak untuk dikonsumsi serta masih kurangnya peran serta dari masyarakat terhadap program Pamsimas, dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya : Pertama, untuk menganalisis implementasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Desa Batuah serta menganalisis faktor penghambat dari program tersebut.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Kebijakan Publik***

Frederich dalam Pramono (2020:30) menurutnya kebijakan publik ialah sejumlah deretan kegiatan atau tindakan yang ditawarkan oleh individu, kelompok atau masyarakat dalam lingkungan tertentu yang memiliki kendala dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut ditawarkan supaya dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam Anggara (2014:41) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menjelaskan secara teknis *Public policy* memiliki tingkatan diantaranya : Pertama, lingkup nasional

terdiri dari kebijakan nasional (UUD, Tap MPR, UU, dan Perpu), kebijakan umum (PP, Keppres dan Inpres), kebijakan pelaksana. Kedua, lingkup wilayah daerah terdiri atas kebijakan umum (Pergub & Perbup/Perwali), kebijakan pelaksana bersifat Desentralisasi (Instruksi Gubernur/Bupati/Wali kota), dekonsentrasi (Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota), & tugas pembantuan. Adapun proses dalam kebijakan publik sebagaimana yang diungkapkan oleh Dunn dalam Nurdin (2019:15) diantaranya ialah perumusan masalah (*problem structuring*) dilaksanakan melalui penyusunan agenda, Peramalan (*forecasting*) dilaksanakan dalam tahap formulasi kebijakan, rekomendasi (*recommendation*) dilaksanakan dalam tahap adopsi kebijakan, Pemantauan (*monitoring*) pada tahap ini akan membantu *stakeholder* pada tahap implementasi kebijakan, terakhir penilaian (*evaluation*).

### **Implementasi Kebijakan Publik**

Meter dan Horn dalam Situmorang (2016:174) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik sebagai upaya-upaya yang dilaksanakan oleh individu maupun kelompok, pemerintah maupun pihak swasta. Maksud dari tindakan-tindakan tersebut meliputi segala usaha yang dilakukan untuk mengubah segala keputusan menjadi suatu tindakan operasional untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Menurut Edward III dalam Abdoellah & Rusfiana (2016:68-70) menjelaskan empat variabel yang digunakan sebagai tolak ukur kesuksesan implementasi yang diantaranya ialah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Selanjutnya model implementasi program menurut Korten dalam Bahri et al. (2020) bahwa keberhasilan program akan tercapai bila terdapat kesesuaian dengan ketiga indikator diantaranya indikator program yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang diperlukan oleh kelompok sasaran, indikator organisasi pelaksana yaitu terletak pada keselarasan antara tugas yang program tersebut ajukan dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi yang melaksanakan, dan indikator ketepatan sasaran yaitu terletak pada kesesuaian antara kelompok sasaran dan pencapaian yang telah ditentukan oleh organisasi pelaksana.

### **Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat**

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat yang sering disebut sebagai Pamsimas ialah inisiatif pengembangan infrastruktur air minum dan sanitasi di wilayah pedesaan yang berfokus pada partisipasi aktif masyarakat. Tujuan dari program Pamsimas ialah untuk memperluas jangkauan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi secara terus-menerus (berkelanjutan) dilingkungan pedesaan dan wilayah pinggiran.

Dalam Peraturan pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum dijelaskan bahwa air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan ataupun yang tidak melalui proses pengolahan, akan tetapi air tersebut harus memenuhi syarat kesehatan dan dapat

langsung diminim. Penyediaan air minum ialah tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan menangani kepentingan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, serta meningkatkan produktivitas. Dalam konteks ini, kepala daerahlah yang memegang peran sebagai pelaksana utama.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah suatu rangkaian kegiatan yang disusun oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi permasalahan air minum dan sanitasi.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini antara lain :

1. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara : a). Program; b). Organisasi Pelaksana; c). Kelompok Sasaran.
2. Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan *informan/key informan*. Data yang digunakan mencakup data primer dan data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang diterapkan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data kualitatif, penelitian ini menggunakan analisis data model interaktif oleh Miles&Huberman, yang terdiri dari Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, serta Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### ***1. Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.***

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Korten dalam (Bahri et al., 2020), keberhasilan implementasi program diukur berdasarkan sejumlah indikator yang diantaranya sebagai berikut :

##### ***a. Program***

Korten menyatakan bahwa keberhasilan sebuah program bisa dinilai dari sejauh mana program tersebut cocok dengan kebutuhan penerima manfaat, yakni sejauh mana program tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Hal-hal yang mencakup dalam indikator program yakni perencanaan terkait dengan rencana kerja pengembangan sumur bor Pamsimas (IPA Pamsimas) di Desa Batuah telah tertuang dalam RPJMDesa Batuah Tahun 2020-

2025, selain itu dalam perencanaan kerja pemerintah Desa Batuah telah membentuk kelompok dan satuan pelaksana Pamsimas (IPA Pamsimas). Selanjutnya kejelasan tujuan dan kebijakan pelaksanaan dalam hal ini pemerintah Desa Batuah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pemenuhan kebutuhan dasar yakni ketersediaan akses air bersih, sehat dan layak untuk kebutuhan sehari-hari. Namun sosialisasi mengenai program Pamsimas dan pelatihan-pelatihan yang semestinya belum dilakukan oleh pihak pemerintah desa maupun lembaga yang terkait. Berdasarkan hal tersebut kejelasan tujuan yang ingin dicapai pada program Pamsimas (IPA Pamsimas) masih belum sesuai dengan yang tertuang pada Pedoman Umum Program pamsimas tahun 2022, meskipun kebijakan pelaksana program telah berlandaskan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 11 Tahun 2018 tentang rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD MPL). Selanjutnya anggaran pelaksanaan program Pamsimas di Desa Batuah diperoleh melalui beberapa sumber yakni dana kontribusi masyarakat dalam bentuk uang tunai (*in-cash*) dan tenaga kerja/material (*in-kind*), serta bantuan non-pemerintah yang berasal dari program Corporate Sosial Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta, hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Pedoman Umum Pamsimas tahun 2022. Adapun strategi pelaksanaan program IPA Pamsimas di Desa Batuah menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi antara perguruan tinggi negeri dengan perusahaan swasta. Peneliti menyimpulkan berdasarkan konteks kesesuaian yang ditekankan oleh Korten bahwa kesesuaian antara program IPA Pamsimas dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Batuah masih kurang sesuai, Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi mengakibatkan apa yang ditawarkan oleh program belum tersampaikan kepada pemanfaat.

#### **b. Organisasi Pelaksana**

Dalam organisasi pelaksana, Korten menekankan perlu adanya kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana. Dijelaskan menurut Korten dalam Tresiana & Noverman (2021:14) bahwa bila organisasi pelaksana tidak memiliki kecakapan dalam mengerjakan instruksi yang diharuskan oleh program, maka organisasi tersebut tidak akan mampu menghasilkan output program dengan baik. Hal-hal yang mencakup dalam indikator organisasi pelaksana dari segi aspek pemahaman dan pengetahuan para pelaksana terkait dengan permasalahan air bersih dan pembangunan infrastruktur sumber air di Desa Batuah telah sesuai antara tugas yang dibebankan dengan kapasitas organisasi, dalam hal ini merujuk kepada masyarakat, pemerintah setempat, perguruan tinggi negeri dan perusahaan swasta yang terlibat. Begitupun dengan arah respon pelaksana dimana organisasi pelaksana telah merespon permasalahan air bersih dengan baik, hal ini ditunjukkan dari kemampuan organisasi pelaksana program IPA Pamsimas dalam menjalankan tugas sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta SK Kepala Desa terkait pembentukan kelompok dan satuan pelaksana program Pamsimas (IPA Pamsimas) menjadi dasar hukum yang memvalidasi keberlangsungan dan keberlanjutan program di Desa Batuah. Hal-hal tersebut sejalan dengan konteks kesesuaian Korten memperlihatkan adanya kesesuaian antara tugas yang dibebankan dengan kemampuan organisasi pelaksana itu sendiri.

**c. *Kelompok Sasaran***

Kelompok sasaran yang dimaksud oleh Korten yaitu perlu adanya kesesuaian antara sasaran program dengan hasil yang telah ditetapkan sebelumnya oleh organisasi pelaksana sehingga program tersebut dapat menghadirkan manfaat kepada kelompok sasaran. Dalam indikator kelompok sasaran memuat hal-hal yang diantaranya ialah ketepatan program, dimana melalui program Pamsimas (IPA Pamsimas) telah menyelesaikan permasalahan air bersih di Desa Batuah, begitupun dengan ketepatan pelaksanaan dari program Pamsimas (IPA Pamsimas) itu sendiri telah mampu menyediakan fasilitas Pamsimas hampir diseluruh dusun, yakni dari 10 dusun yang ada 6 diantaranya telah memiliki infrastruktur Pamsimas (IPA Pamsimas) diantaranya Dusun Tani Maju, Dusun Batuah, Dusun Tani Makmur, Dusun Tani Jaya, Dusun Tani Bahagia, dan Dusun Karya Makmur. Selain itu terkait dengan ketepatan sasaran, Desa Batuah sebagai salah satu desa yang tidak terakses layanan PDAM serta daerah yang krisis air bersih dalam hal ini dapat dikatakan cakupan air bersih di Desa Batuah belum mencapai 100%, serta sumber air sumur bor yang dimiliki dapat dikembangkan. Hal-hal tersebut sudah tepat dan sesuai dengan kriteria pemilihan desa sasaran yang tertuang dalam Pedoman Umum Pamsimas tahun 2022.

**2. *Faktor Penghambat Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.***

Hal-hal yang menjadi kendala merupakan faktor penghambat yang dapat mengakibatkan terhambatnya suatu kebijakan atau program. Kendala dalam Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- 1) Kurangnya pemahaman warga tentang air bersih. Hal ini dilihat dari tidak adanya sosialisasi langsung yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat terkait pentingnya air bersih, penting untuk masyarakat memahami bahwa air jernih sekalipun belum tentu bersih, sehat dan layak untuk di konsumsi. Hal ini tentunya menjadi pr bagi pemerintah/lembaga terkait agar masyarakatnya dapat hidup sehat dan berkualitas. Selain itu tidak adanya sosialisasi juga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Hal ini kemudian menjadikan masyarakat kurang berpartisipasi dalam pelaksanaan program tersebut, serta beberapa masyarakat memiliki ketidakpercayaan terhadap proses pembangunan Pamsimas (IPA Pamsimas) menurut mereka hal tersebut



- hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu hal ini merupakan akibat dari tidak adanya transparansi kepada masyarakat. Adapun hal lain yang menjadi penyebab masyarakatnya tidak berpartisipasi dikarenakan daerah masyarakat tersebut sulit untuk diakses atau memiliki kondisi topografi wilayah yang sulit dan banyaknya daerah-daerah yang berada ditengah-tengah daerah pertambangan membuat masyarakat tersebut enggan untuk berpartisipasi dikarenakan hanya menuntut ganti rugi dari perusahaan pertambangan yang terkait.
- 2) Keterbatasan anggaran dana. Pembangunan infrastruktur air minum (IPA Pamsimas) merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. namun Desa Batuah merupakan desa dengan wilayah yang sangat luas dan juga memiliki kondisi topografi/kondisi geologis yang sulit, sehingga untuk memastikan tersedianya air bersih di seluruh wilayah memerlukan investasi yang sangat besar, namun keterbatasan anggaran menjadi salah satu penyebab terbatasnya cakupan program di desa tersebut. Penting untuk diingat bahwa keterbatasan anggaran bukanlah suatu alasan untuk tidak melanjutkan pelaksanaan program. Pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi yang lebih kreatif, seperti kemitraan dengan sektor swasta, mengoptimalkan sumber daya dan lain-lain.

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Berlandaskan pada hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah telah dilaksanakan namun masih kurang maksimal seperti pada indikator program yang dalam aspek perencanaannya tidak dilakukan sosialisasi sehingga apa yang ditawarkan oleh program Pamsimas tidak tersampaikan kepada pemanfaat (masyarakat). Kemudian indikator organisasi pelaksana telah dilaksanakan dengan maksimal dengan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing stakeholder yang terlibat. Selanjutnya indikator kelompok sasaran masih belum maksimal, hal ini dikarenakan sejumlah infrastruktur telah dibangun di enam dusun dari jumlah 10 dusun yang ada namun akses capaian pengguna di masing-masing enam dusun tersebut belum mencapai 100% dari target sasaran yang ditetapkan diawal.

Selanjutnya berkenaan dengan faktor penghambat pada Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Batuah yaitu tidak adanya edukasi terkait air bersih maupun sosialisai program Pamsimas, serta masih adanya keterbatasan anggaran dalam upaya meningkatkan capaian pengguna program Pamsimas.

### **Saran**

Berdasarkan beberapa faktor penghambat yang menjadi kendala oleh pelaksana program Pamsimas di Desa Batuah, maka peneliti kemudian merekomendasikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Diharapkan adanya peran aktif dari pemerintah desa setempat dalam memberikan pemahaman melalui sosialisasi kepada masyarakat, seperti mengadakan sosialisasi rutin ataupun menyebarkan pamflet mengenai program Pamsimas, dapat pula dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan membuat video mengenai program Pamsimas yang dapat disosialisasikan melalui media sosial ataupun website desa.
2. Penting bagi pemerintah setempat untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dengan menambah sumber-sumber dana alternatif seperti membangun banyak kerja sama melalui program CSR dari perusahaan-perusahaan swasta di sekitar.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, A. Y., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori & Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala. (2020). *Model Implementasi Progam Lembaga Penjaminan Mutu* (R. Hartono (ed.)). Widina Bhakti Persada.
- Nuridin, E. S. (2019). *Teori-Teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Maulana Media Grafika.
- Pedoman Umum Pamsimas. (2022). [https://pamsimas.pu.go.id/konten/p-1\\_pedoman-umum-2022.pdf](https://pamsimas.pu.go.id/konten/p-1_pedoman-umum-2022.pdf) . Diakses tanggal 19 Juni 2024
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Sutoyo (ed.)). Unisri Press.
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Social Security Development Institute.
- Tresiana, N., & Noverman, D. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)* (Pertama). Suluh Media.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah